

DAMPAK KASUS PREMANISME TERHADAP INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA

(Studi Kasus: Premanisme di Daerah Istimewa Yogyakarta)

Yarmanto

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta, Indonesia

Email: yarmanto@stipram.ac.id

Article Info	Abstract
Kata Kunci: Perilaku Pariwisata; Kekerasan; Pungutan Liar; Keamanan dan Keselamatan; Perilaku Pemasaran	Kasus-kasus premanisme yang terus terjadi di sektor pariwisata, khususnya di Yogyakarta, menunjukkan adanya masalah serius dalam industri pariwisata Indonesia. Praktik-praktik ini sering kali melibatkan penawaran layanan atau produk dengan harga jauh di atas normal, atau memaksa wisatawan untuk membayar biaya yang tidak perlu. Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan wisatawan secara finansial tetapi juga merusak reputasi sektor pariwisata Yogyakarta secara keseluruhan. Kasus-kasus premanisme ini menunjukkan gangguan yang perlu ditangani segera agar pariwisata di Yogyakarta dapat berkembang secara adil, aman, dan berkualitas. Jumlah kunjungan wisatawan ke Yogyakarta pasti akan menurun jika kasus-kasus premanisme dan pemerasan terjadi di berbagai penjuru kota. Hal ini tidak hanya mengganggu keamanan wisatawan tetapi juga secara signifikan mengganggu kenikmatan pemandangan alam, situs sejarah, dan pendidikan budaya. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaku premanisme dan menegakkan hukum dengan tegas untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Penegakan hukum yang tegas akan mengirimkan sinyal kuat bahwa tindakan premanisme tidak akan ditoleransi di industri pariwisata Yogyakarta. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata agar mereka memiliki pemahaman yang baik tentang etika bisnis yang benar dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan pariwisata yang profesional dan aman yang memprioritaskan kepentingan wisatawan, sehingga kasus-kasus premanisme dapat berkurang secara signifikan dan Yogyakarta dapat memperoleh kepercayaan wisatawan yang lebih kuat. Dalam menangani kasus-kasus premanisme di industri pariwisata, beberapa tindakan yang dapat diambil antara lain: 1) Meningkatkan keamanan di destinasi
Diterima: 10 November 2025	
Disetujui: 17 November 2025	
Diterbitkan: 30 November 2025	

wisata. Langkah ini penting untuk memberantas premanisme. Diperlukan peningkatan patroli intensif dan ketat di kawasan wisata, termasuk kerja sama dengan kepolisian. Pemasangan CCTV juga perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan pengawasan dan mengidentifikasi potensi premanisme. Melalui langkah ini, wisatawan akan merasa lebih aman dan terlindungi selama kunjungan mereka ke Yogyakarta, 2) Pendidikan dan Kesadaran: Program pendidikan dan kesadaran sangat penting dalam mengubah pola pikir masyarakat terkait premanisme. Melalui kampanye pendidikan, masyarakat perlu diberi pemahaman tentang pentingnya menjaga keamanan dan membangun budaya yang tidak mendukung tindak kejahatan di sektor pariwisata. Visibilitas publik. Generasi muda, khususnya, juga perlu meningkatkan upaya mereka untuk mempromosikan nilai-nilai positif pariwisata guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan ramah wisatawan. 3) Penyuluhan dan Pelatihan: Melakukan penyuluhan dan pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata, karyawan hotel, dan pemandu wisata mengenai pencegahan dan penanganan premanisme. Pelatihan ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam menangani situasi yang berpotensi menjadi kasus premanisme serta memberikan panduan langkah-langkah yang harus diambil dalam menghadapinya.

Abstract

The ongoing cases of thuggery in the tourism sector, particularly in Yogyakarta, indicate a serious problem within the Indonesian tourism industry. These practices often involve offering services or products at prices far above normal or forcing tourists to pay unnecessary fees. Such actions not only harm tourists financially but also damage the reputation of Yogyakarta's tourism sector. These cases of hugger indicate a disruption that needs to be addressed immediately so that tourism in Yogyakarta can develop fairly, safely, and with quality. The number of tourist visits to Yogyakarta will certainly decline if cases of thuggery and extortion occur in various corners of the city. This not only disrupts tourist safety but also significantly disrupts the enjoyment of natural scenery, historical sites, and cultural education. The government also needs to increase supervision of perpetrators of thuggery and enforce the law firmly to provide a deterrent effect to perpetrators. Firm law enforcement will send a strong signal that thuggery will not be tolerated in the

Yogyakarta tourism industry. In addition, it is also important to improve education and training for tourism business actors to ensure that they have a good understanding of proper business ethics and are able to provide good service to tourists. Thus, it is hoped that a professional, safe tourism environment can be created that prioritizes the interests of tourists, so that cases of thuggery can be reduced significantly and Yogyakarta can gain stronger tourist trust. In dealing with cases of thuggery in the tourism industry, several suggested actions that can be taken are: 1) Improving security at tourism destinations. This step is important to combat thuggery. It is necessary to increase intensive, tight patrols in tourism areas, including cooperation with the police. CCTV installation also needs to be considered to increase supervision and select potential thuggery. Through this step, tourists will feel safer and more protected during their visit to Yogyakarta, 2) Education and Awareness: Education and awareness programs are very important in changing the public mindset regarding thuggery. Through educational campaigns, the public needs to be given an understanding of the importance of maintaining security and building a culture that does not support thuggery in the tourism sector. Public visibility. The younger generation, in particular, must also increase their efforts to promote the positive values of tourism to create a safer and more tourist-friendly environment. 3) Outreach and Training: Conduct outreach and training for tourism businesses, hotel employees, and tour guides on preventing and addressing thuggery. This training can help increase awareness and skills in dealing with situations that have the potential to become thuggery cases and provide guidance on the steps to take in dealing with them.

Keywords: *Tourism Behavior; Thuggery; Extortion; Safe and Security; Marketing Behavior*

PENDAHULUAN

Yogyakarta atau yang akrab disebut Jogja merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia yang memiliki daya tarik historis, budaya, dan alam yang kuat. Keberadaan destinasi ikonik seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Keraton Yogyakarta, Taman Sari, dan Pantai Parangtritis menjadikan wilayah ini sebagai magnet bagi wisatawan domestik maupun mancanegara (Yulianto, 2017). Data Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa pada Juni 2025 terjadi kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 7,47 persen dibandingkan bulan sebelumnya, sementara kunjungan wisatawan nusantara mengalami penurunan 4,59 persen. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang tercatat sebesar 53,86 persen, sedangkan hotel nonbintang sebesar 25,56 persen, dengan rata-rata lama menginap masing-masing 1,54 malam dan 1,16 malam. Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga signifikan, yakni sekitar 25 persen, yang menunjukkan bahwa pariwisata menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Namun demikian, di balik pertumbuhan tersebut, sektor pariwisata Yogyakarta menghadapi tantangan serius berupa praktik premanisme yang berpotensi mengganggu stabilitas dan citra destinasi. Salah satu fenomena yang meresahkan adalah klitih (Suhendra, 2025), yang awalnya merujuk pada aktivitas berkeliling tanpa tujuan jelas, tetapi berkembang menjadi bentuk kejahatan jalanan terorganisasi yang menyasar pelajar maupun masyarakat umum. Praktik ini tidak hanya menciptakan rasa tidak aman bagi warga dan wisatawan, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kunjungan serta merusak reputasi Yogyakarta sebagai kota wisata yang aman dan ramah.

Munculnya premanisme di sektor pariwisata tidak terlepas dari berbagai faktor struktural, seperti ketimpangan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, kurangnya pengawasan di kawasan wisata, serta kemungkinan keterlibatan oknum tertentu yang memperumit proses penanganan. Dalam konteks industri pariwisata yang sangat bergantung pada persepsi keamanan dan kenyamanan, keberadaan premanisme menjadi ancaman nyata terhadap keberlanjutan pembangunan sektor ini (Waruwu, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan utama, yaitu bagaimana peran pemerintah

dalam menanggulangi kasus premanisme di industri pariwisata Yogyakarta dan bagaimana dampak premanisme terhadap keberlangsungan industri pariwisata di daerah tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi yang dapat dilakukan oleh pihak berwenang dalam mencegah dan menanggulangi premanisme, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam praktik tersebut, serta menganalisis dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan bagi masyarakat dan sektor pariwisata di Yogyakarta. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual maupun praktis dalam upaya menjaga keamanan dan keberlanjutan industri pariwisata daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena premanisme di sektor pariwisata Yogyakarta, khususnya terkait peran pemerintah dalam penanggulangannya serta dampaknya terhadap keberlangsungan industri pariwisata daerah. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, dan dinamika sosial yang melatarbelakangi munculnya praktik premanisme, termasuk fenomena klitih sebagai bentuk kejahatan jalanan yang berkembang di wilayah tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan yang dipilih secara purposive, meliputi aparat pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha pariwisata (hotel, restoran, dan pengelola destinasi wisata), serta masyarakat di kawasan wisata. Selain itu, observasi lapangan juga dilakukan di beberapa titik destinasi wisata yang dianggap rawan terhadap praktik premanisme untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi keamanan dan pengawasan. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap laporan resmi pemerintah daerah, data statistik pariwisata, peraturan perundang-undangan terkait keamanan dan ketertiban umum, serta kajian ilmiah dan pemberitaan media yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan keleluasaan kepada informan dalam

menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka. Observasi dilakukan secara non-partisipatif guna mengamati situasi sosial di kawasan wisata tanpa terlibat langsung dalam aktivitas subjek penelitian. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memperkuat validitas data melalui triangulasi sumber.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh diseleksi dan dikategorikan berdasarkan tema-tema penelitian, seperti faktor penyebab premanisme, peran pemerintah, serta dampak sosial dan ekonomi terhadap industri pariwisata. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, serta melakukan pengecekan ulang (member check) kepada beberapa informan kunci. Dengan metode tersebut, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai strategi penanggulangan premanisme dan implikasinya terhadap keberlanjutan industri pariwisata di Yogyakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Industri pariwisata merupakan sektor penting dalam perekonomian suatu negara, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur (Amelia & Prasetyo, 2023). Namun, seperti halnya industri lainnya, industri pariwisata tidak terlepas dari beberapa masalah yang mungkin terjadi, salah satunya adalah premanisme.

Premanisme di industri pariwisata di Yogyakarta menjadi isu yang serius dan perlu segera ditangani agar industri pariwisata di Yogyakarta tetap menjadi destinasi wisata yang aman dan nyaman. Sebagai penanggung jawab utama sektor pariwisata di Indonesia, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi kasus premanisme di industri pariwisata di Yogyakarta. Peran pemerintah dalam menanggulangi kasus premanisme dapat dimulai dari penyediaan regulasi yang ketat. Pemerintah dapat membuat kebijakan dan regulasi yang membatasi aktivitas premanisme di wilayah pariwisata, serta memberikan sanksi tegas kepada pelaku premanisme.

Dalam hal ini, pemerintah dapat memperketat pemberian izin usaha bagi pengusaha pariwisata yang ingin beroperasi di wilayah pariwisata, serta melakukan evaluasi terhadap pengusaha yang

telah beroperasi. Selain itu, pemerintah dapat memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik premanisme di wilayah pariwisata (Bhaskara et al., 2023). Pemerintah dapat menempatkan petugas keamanan dan penegak hukum di setiap titik wisata yang rawan terjadi praktik premanisme, serta melakukan patroli secara rutin untuk memastikan wilayah pariwisata tetap aman dan nyaman untuk dikunjungi oleh wisatawan,

Pemerintah juga dapat memberikan dukungan kepada pengusaha pariwisata untuk mencegah terjadinya praktik premanisme. Pemerintah dapat memberikan pelatihan dan pembinaan kepada pengusaha pariwisata tentang cara mengelola usaha pariwisata yang baik (Ohyver et al., 2024), termasuk aman dari praktik premanisme. Pemerintah dapat memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti pengusaha pariwisata, organisasi masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat dalam menanggulangi kasus premanisme di wilayah pariwisata. Pemerintah harus memperketat regulasi, memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, memberikan dukungan kepada pengusaha pariwisata, serta memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam menanggulangi kasus premanisme di wilayah pariwisata.

Premanisme di daerah pariwisata dapat terjadi karena banyak faktor. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya premanisme di daerah pariwisata:

1. Kesenjangan ekonomi: Di daerah pariwisata, sering terdapat kesenjangan ekonomi yang signifikan antara masyarakat lokal dan wisatawan atau pengusaha pariwisata. Ketimpangan ini dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketidakadilan sosial, yang pada gilirannya dapat memicu tumbuhnya kelompok preman yang mencoba memperoleh keuntungan dari pariwisata
2. Ketidakstabilan sosial: Kehadiran industri pariwisata yang besar dapat mengubah dinamika sosial di daerah tersebut. Banyaknya wisatawan, pergantian budaya, perubahan nilai-nilai sosial, dan kemungkinan terjadinya perubahan pekerjaan atau perumahan dapat menciptakan ketidakstabilan sosial. Premanisme dapat muncul sebagai respons terhadap perubahan ini, di mana kelompok-kelompok preman berusaha mengendalikan sumber daya dan melindungi kepentingan mereka.
3. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum: Daerah pariwisata sering kali menghadapi tantangan dalam hal

penegakan hukum dan pengawasan keamanan. Fokus pada industri pariwisata, kurangnya sumber daya, atau korupsi dapat menghambat penegakan hukum yang efektif. Hal ini dapat memberikan kesempatan bagi kelompok preman untuk beroperasi tanpa hambatan dan memperkuat kehadiran mereka di daerah pariwisata.

4. Gangguan lingkungan, Pertumbuhan industri pariwisata yang cepat dapat menimbulkan gangguan lingkungan, seperti kensakan ekosistem, peningkatan sampah, dan kerusakan infrastruktur lokal. Jika masyarakat lokal merasa tidak dihargai atau tidak mendapatkan manfaat dari industri pariwisata, meruka mungkin cenderung terlibat dalam premanisme sebagai bentuk protes atau cara untuk mendapatkan keuntungan secara tidak resmi.

Premanisme di industri pariwisata di Yogyakarta telah memberikan dampak yang buruk bagi perkembangan industri pariwisata di daerah tersebut. Praktik premanisme di industri pariwisata dapat mengancam keselamatan dan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta dan merusak citra pariwisata di Yogyakarta sebagai destinasi wisata yang aman dan nyaman. Dampak negatif premanisme pada industri pariwisata (Ayunda & Annova, 2024), begitu juga di Yogyakarta antara lain menurunnya jumlah kunjungan wisatawan ke Yogyakarta. Praktik premanisme dapat menimbulkan ketakutan dan ketidaknyamanan pada wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Hal ini dapat menyebabkan wisatawan tidak mau lagi berkunjung ke Yogyakarta dan beralih ke destinasi wisata lain yang lebih aman dan nyaman, praktik premanisme juga dapat merusak citra pariwisata di Yogyakarta. Jika industri pariwisata di Yogyakarta dipenuhi dengan praktik premanisme, maka citra Yogyakarta sebagai destinasi wisata yang aman dan nyaman dapat rusak.

Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya kepercayaan wisatawan terhadap Yogyakarta sebagai destinasi wisata, sehingga jumlah wisatawan yang datang ke Yogyakarta akan semakin berkurang. Praktik premanisme juga dapat mengurangi pendapatan yang dihasilkan oleh industri pariwisata di Yogyakarta. Jika wisatawan mengalami kerugian akibat praktik premanisme, maka mereka mungkin tidak akan mau mengeluarkan uang lagi untuk mengunjungi tempat wisata di Yogyakarta. Selain itu, wisatawan yang mengalami kerugian akibat praktik premanisme mungkin

akan memberitahukan pengalaman buruk mereka kepada jentan dan keluarga mereka, sehingga dapat mempengaruhi jumlah wisatawan yang datang ke Yogyakarta, Dampak premanisme pada industri pariwisata di Yogyakarta tulak hanya berdampak pada wisatawan, tetapi juga pada pengusaha pariwisata. Hal ini dapat menyebabkan pengusaha pariwisata mengalami kerugian finansial dan bahkan bangkrut.

Premanisme di sektor pariwisata dapat menimbulkan dampak negatif yang cukup besar. Salali satu dampaknya adalah menurunnya jumlah kunjungan wisatawan ke suatu daerah, yang berdampak pada penurunan pendapatan dan pertumbuhan industri pariwisata. Selain itu, premanisme juga dapat merusak citra pariwisata suatu daerah, baik di mata wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan wisatawan dan menurunkan minat mereka untuk berkunjung ke destinasi pariwisata tersebut. Dampak premanisme juga dapat dirasakan oleh para pelaku usaha pariwisata, seperti pengusaha hotel dan restoran, yang merugi karena terpaksa membayar pungutan liar dan uang keamanan untuk menghindari ancaman preman Dalam skala yang lebih luas, praktik premanisme dapat mengurangi potensi industri pariwisata Indonesia untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Dampak yang dirasakan akibat adanya premanisme di sektor pariwisata Yogyakarta adalah kehilangan kepercayaan wisatawan. Praktik premanisme yang merajalela membuat wisatawan merasa tidak aman dan terancam oleh tindakan-tindakan tersebut. Hal ini berakibat pada penurunan jumlah kunjungan wisatawan yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan para pelaku usaha pariwisata. Padahal, pariwisata merupakan salah satu sektor andalan yang berperan penting dalam perekonomian masyarakat Yogyakarta. Dengan kehilangan kepercayaan wisatawan, citra pariwisata Yogyakarta tercoreng dan sulit untuk membangun kembali kepercayaan yang telah hilang diakibatkan kurangnya keamanan dan kenyamanan wisatawan saat berkunjung.

Praktik premanisme merupakan ancaman serious bagi perkembangan dan pertumbuhan usaha pariwisata. Tindakan kekerasan intimidasi, dan pemerasan yang dilakukan oleh kelompok preman dapat menghalangi bisnis pariwisata untuk tumbuh dan berkembang (Li, 2022). Kasus kasus premanisme yang merajalela dapat membuat para pelaku usaha pariwisata dan wisatawan merasa tidak aman dan tidak nyaman. Hal ini dapat

menurunkan minat kunjungan wisatawan ke suatu daerah dan merusak citra destinasi pariwisata tersebut. Selain itu, premanisme juga dapat menimbulkan kerugian finansial bagi pelaku usaha pariwisata, karena terpaksa membayar pungutan liar dan uang keamanan untuk menghindari ancaman preman

Premanisme menjadi masalah serius yang kerap terjadi dalam industri pariwisata Yogyakarta. Praktik premanisme ini sangat merusak citra pariwisata kota tersebut. mengakibatkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan, merugikan para pelaku usaha di sektor pariwisata, mengancam keamanan dan kenyamanan para wisatawan, serta mempengaruhi citra Yogyakarta di mata internasional. Premanisme menjadi hambatan yang perlu diatasi dengan serius agar pariwisata Yogyakarta dapat berkembang dengan baik dan tetap menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan

Penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya premanisme dalam industri pariwisata. Edukasi dan sosialisasi mengenai konsekuensi negatif dari premanisme perlu dilakukan secara terus-menerus kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda sebagai penerus pariwisata di Yogyakarta. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dampak premanisme, diharapkan masyarakat dapat turut aktif dalam melawan dan melaporkan tindakan premanisme yang mereka saksikan.

Peningkatan keamanan dan pengawasan di daerah pariwisata juga menjadi langkah penting dalam mengatasi kasus premanisme. Pihak kepolisian perlu melakukan patroli yang rutin dan intensif di area wisata untuk mencegah dan menangani tindakan premanisme. Penggunaan teknologi seperti pengawasan kamera CCTV dan pengembangan sistem keamanan yang lebih modern dapat membantu mengurangi insiden premanisme yang terjadi (Sutarman et al., 2025).

Selain upaya penegakan hukum dan peningkatan keamanan, kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat juga penting dalam mengatasi premanisme. Pemerintah dapat membentuk forum atau kelompok kerja yang terdiri dari berbagai pihak terkait untuk membahas dan merumuskan strategi bersama dalam menghadapi kasus premanisme. Pelaku usaha dapat berperan aktif dalam memberikan informasi dan laporan ke pihak berwenang, sedangkan masyarakat dapat memberikan dukungan

dan melaporkan kejadian premanisme yang mereka alami (Jusmadi, 2023).

Selain penanganan kasus premanisme secara reaktif, penting juga untuk melakukan pencegahan premanisme dalam industri pariwisata. Misalnya dengan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi para pekerja di sektor pariwisata dapat membantu mengurangi kesempatan bagi oknum preman untuk melakukan tindakan merugikan. Pelatihan mengenai sikap pelayanan yang baik, penanganan konflik, dan kesadaran akan pentingnya keamanan wisatawan harus menjadi fokus dalam upaya pencegahan premanisme

Terakhir, promosi pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku usaha perlu menyertakan pesan-pesan mengenai keamanan dan kenyamanan wisatawan (Suharto et al., 2024). Penekanan pada pengalaman wisata yang aman dan bebas dari tindakan premanisme dapat membantu membangun citra positif dan menarik minat wisatawan untuk mengunjungi Yogyakarta. Selain itu, pemberian penghargaan atau sertifikasi kepada pelaku usaha yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keamanan dan pelayanan yang baik juga dapat mendorong industri pariwisata untuk berkomitmen dalam memberantas premanisme dan menjaga keutuhan citra pariwisata Yogyakarta.

KESIMPULAN

Kasus premanisme yang masih terjadi di sektor pariwisata, terutama di Yogyakarta, mengindikasikan adanya masalah serius dalam industri pariwisata di Indonesia. Praktik premanisme tersebut seringkali melibatkan penawaran jasa atau produk dengan harga yang jauh di atas harga normal, atau pemaksaan terhadap wisatawan untuk membayar biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu dibayarkan. Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan wisatawan secara finansial, tetapi juga merusak reputasi pariwisata Yogyakarta secara keseluruhan. Kasus premanisme semacam ini menunjukkan adanya gangguan yang perlu segera ditangani agar pariwisata di Yogyakarta dapat berkembang secara adil, aman, dan berkualitas.

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaku premanisme dan menegakkan hukum secara tegas guna memberikan efek jera kepada para pelaku. Tindakan penegakan hukum yang tegas akan memberikan sinyal kuat bahwa premanisme tidak akan ditoleransi dalam industri pariwisata di

Yogyakarta. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi para pelaku usaha pariwisata guna memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang etika bisnis yang benar dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan. Dengan demikian, diharapkan dapat terbentuk lingkungan pariwisata yang profesional, aman, dan mengutamakan kepentingan wisatawan, sehingga kasus premanisme dapat dikurangi secara signifikan dan Yogyakarta dapat memperoleh kepercayaan wisatawan yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, V., & Prasetyo, D. (2023). Manfaat Literasi Digital Generasi Z sebagai Preferensi Tujuan Wisata dan Promosi Pariwisata. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 9(2), 377–386.
- Ayunda, L. D., & Annova, F. (2024). Kajian budaya premanisme dan dampaknya terhadap kenyamanan pengunjung (studi kasus di kawasan pesisir Pantai Carocok, pesisir selatan, Sumatera Barat). *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis*, 2(12), 1249–1256.
- Bhaskara, G. I., Par, S. S., Sanjiwani, P. K., & Arida, I. N. S. (2023). *Manajemen Krisis dan Pariwisata*. Nas Media Pustaka.
- Jusmadi, R. (2023). Perlindungan dan Pemberdayaan Hukum Terhadap Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata di Kabupaten Bangkalan. *INICIO LEGIS*, 4(2), 127–140.
- Li, D. (2022). *Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengelola Wisata Atas Keamanan Dan Keselamatan Bagi Wisatawan (Studi Kasus di Pantai Sialang Buah Kabupaten Serdang Bedagai)*. UNIMED.
- Ohyver, D. A., Kusumajanti, K., Pracintya, I. A. E., Kuntarto, G. P., & Kusuma, I. B. S. (2024). *Pariwisata Indonesia: Tata kelola & pengembangan pariwisata di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Suharto, B., Judijanto, L., Apriyanto, H., Raksapati, A., Payangan, O. R., Tikupadang, W. K., Khairunnisa, A., Yanti, D. I. W., Hidayat, D. R., & Samuel, S. (2024). *Pariwisata Berkelanjutan: Prinsip, Perspektif, dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Suhendra, M. W. (2025). *Formulasi Penanganan Terpadu Kejahatan” Klitih” di Daerah Istimewa Yogyakarta: Analisis dan Evaluasi Model Penanganan*. Universitas Islam Indonesia.
- Sutarman, M., Akhyar, T., & Afriany, D. (2025). Peran Kepemimpinan PJ Walikota Ratu Dewa Terhadap

- Premanisme di Kawasan Wisata Kota Palembang. *Jurnal Studi Ilmu Politik*, 4(2), 61–75.
- Waruwu, I. F. (2023, December 11). *Upaya Penegakan Hukum Premanisme Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Rasa Aman di Masyarakat*. Universitas HKBP Nommensen.
<https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/9738>
- Yulianto, A. (2017). Analisis Objek Daya Tarik Wisata Favorit Berdasarkan Jumlah Pengunjung Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Media Wisata*, 15(2).